



PERALIHAN SISTEM PEMERINTAHAN KESULTANAN BIMA MENJADI SISTEM SWAPRAJA KABUPATEN BIMA PADA TAHUN 1945-1957

¹Ilmiawan Mubin, ²Ika Kusumawati

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹ilmiawanmubin@gmail.com, ²ikakusumawati@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 23-05-2019

Disetujui: 30-06-2019

Kata Kunci:

Masa Pemerintahan,
Kesultanan,
Swapraja.

ABSTRAK

Abstrak: Dalam sejarah Bima disebut bahwa kerajaan Bima dahulu terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing dipimpin oleh kelompok ncuhi. Ada lima Ncuhi yang menguasai lima wilayah yaitu: (1) Ncuhi Dara, memegang kekuasaan wilayah Bima Tengah, (2) Ncuhi Parewa, memegang kekuasaan wilayah Bima Selatan, (3) Ncuhi Padolo, memegang kekuasaan wilayah Bima Barat, (4) Ncuhi Banggapupa, memegang kekuasaan wilayah Bima Utara, dan (5) Ncuhi Dorowani, memegang kekuasaan wilayah Bima Timur. Kelima Ncuhi ini hidup berdampingan damai, saling hormat menghormati dan selalu mengadakan musyawarahmufakat bila ada sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder tentang Peralihan sistem pemerintahan kesultanan Bima menjadi sistem swapraja kabupaten Bima pada tahun 1945-1957. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) proses Peralihan sistem pemerintahan kesultanan Bima menjadi sistem swapraja kabupaten Bima pada tahun 1945-1957. Karna pada saat itu didorong oleh kemerdekaan sehingga memberi perubahan terhadap politik serta menyesuaikan hasil dari KMB dan juga di dukung oleh UUD No.68 tahun 1958 tentang pembentukan Bali, NTB dan NTT, 2) Dampak peralihan sistem pemerintahan kesultanan Bima menjadi sistem swapraja kabupaten Bima pada tahun 1945-1957 membawa dampak positif maupun negatif kesultanan Bima pada saat itu mulai memudar antara hukum Islam dan hukum adat dalam masyarakat. Namun pada saat itu pula Kesultanan Bima dapat menjalin kerja sama yang baik dengan KNID dalam menghadapi penjajah jepang dan NICA.

Abstract: In the history of Bima it is called that the kingdom of Bima was fragmented in small groups, each led by ncuhi. There were five Ncuhi who ruled five regions: (1) Ncuhi Dara, wielding the power of the central Bima region, (2) Ncuhi Parewa, holds the power of South Bima, (3) Ncuhi Padolo, wielding the territory of West Bima, (4) Ncuhi Banggapupa, holding the power of North Bima, and (5) Ncuhi Dorowani The East Bima region. These five Ncuhi live alongside peace, respect each other and always hold a musyawarahmufakat when there is something related to common interests. The methods used in this study are qualitative research with ethnographic approaches. The type of data used in this study is qualitative data. The data source in this research is the primary data source and secondary data source about the transitional system of Bima's government to become the system of Bima Regency in 1945-1957. Based on the results of the study can be concluded that, 1) the process of transitional administration system of the Sultanate of Bima became the government system of Bima Regency in 1945-1957. Karna at the time was driven by independence so as to give changes to As well as adapting the results of the KMB and supported by the Constitution No. 68 of 1958 on the formation of Bali, NTB and NTT, 2) The impact of the government system of Bima's existence to become the system of the Bima Regency in 1945-1957 brought positive impact and negative Bima Sultanate at the time began to fade between Islamic law and customary law in society. But at that time, Bima Sultanate could establish good cooperation with KNID in the face of Japanese invaders and NICA.



A. LATAR BELAKANG

Sejak jatuhnya rezim orde lama maka sistem pemerintahan yang fundamental sudah dimulai dengan adanya gerakan reformasi disemua bidang kehidupan termasuk sistem pemerintahan daerah, pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami berbagai upaya perbaikan yang bertujuan untuk perubahan dasar hukum yang melandasi pelaksanaan pemerintah daerah. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan ini pembenahan sistem pemerintah daerah terus berjalan dinamis seiring dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.(Abdulah Tajib, 1945:49-57).

Indonesia terbagi atas bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu Baru demikianpula halnya dengan penduduk yang mendiami daerah Kabupaten Bima, mereka yang menyebut dirinya dou mbojo, dou donggo yang mendiami kawasan pesisir pantai.Disamping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura,Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Dalam sejarah Bima disebutkan bahwa kerajaan Bima dahulu terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok kecilyang masing-masing dipimpin oleh Ncuhi. Ada lima Ncuhi yang menguasai lima wilayah yaitu; (1) Ncuhi Dara,memegang kekuasaan wilayah Bima Tengah, (2) Ncuhi Parewa, memegang kekuasaan wilayah Bima Selatan, (3) Ncuhi Padolo, memegang kekuasaan wilayah Bima Barat, (4) Ncuhi Banggapupa, memegang kekuasaan wilayah Bima Utara, dan (5) Ncuhi Dorowani, memegang kekuasaan wilayah Bima Timur(Djamaludin Sahidu,1945:51).

Kelima Ncuhi ini hidup berdampingan damai, saling hormat menghormati dan selalu mengadakan musyawarahmufakat bila ada sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Dari kelima Ncuhi tersebut yang bertindak sebagai pemimpin dari Ncuhi lainnya adalah Ncuhi Dara.Pada masa-masa berikutnya para Ncuhi ini dipersatukan oleh seorang utusan yang berasal dari Jawa. Menurut legendayang dipercaya secara turun temurun oleh masyarakat Bima bahwacikal bakal Kerajaan Bima adalah Maharaja Pandu Dewatayang mempunyai

lima orang putra yaitu; (1) Darmawangsa, (2) Sang Bima, (3) Sang Arjuna, (4) Sang Kula, dan (5) Sang Dewa.

Salah seorang dari lima bersaudara ini yakni Sang Bima berlayar ke arah timur dan mendarat disebuah pulau kecildisebelah utara Kecamatan Sanggar yang bernama Satonda.Sang Bima inilah yang mempersatukan kelima Ncuhi dalam satu kerajaan yakni Kerajaan Bima. Sang Bima sebagairaja pertama bergelar Sangaji dan Sejak saat itulah Bima menjadi sebuah kerajaan yang berdasarkan hadat dan saat itupulalah hadat Kerajaan Bima ditetapkan berlaku bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Hadat ini berlaku terus-menerus danmengalami perubahan pada masa pemerintahan Raja Ma Wa,a Bilmana.(Abdulah Tajib, 1945:43-46).

Setelah menanamkan sendi-sendi dasar pemerintahan berdasarkan Hadat, Sang Bima meninggalkan Kerajaan Bimamenuju timur, tahta kerajaan selanjutnya diserahkan kepada Ncuhi Dara hingga putra Sang Bima yang bernama IndraZamrud sebagai pewaris tahta datang kembali ke Bima pada abad XIV/ XV.Beberapa perubahan Pemerintahan yang semula berdasarkan Hadat ketika pemerintahan Raja Ma Waa Bilmana yaitu; (a) Istilah Tureli Nggampo diganti dengan istilah Raja Bicara, (b) Tahta Kerajaan yang seharusnya diduduki oleh garis lurus keturunan raja sempat diduduki oleh yang bukan garis lurusketurunan raja.

Perubahan yang melanggar hadat ini terjadi dengan diangkatnya adik kandung Raja Ma Wa,aBilmana yaitu Manggampo Donggo yang menjabat Raja Bicara untuk menduduki tahta kerajaan. Pada saat pengukuhanManggampo Donggo sebagai raja dilakukan dengan sumpah bahwa keturunannya tetap sebagai raja sementaraketurunan Raja Ma Wa,a Bilmana sebagai Raja Bicara.

Kebijaksanaan ini dilakukan Raja Ma Wa,a Bilmana karena keadaan rakyat pada saat itu sangat memprihatinkan sehingga berakibat padakemiskinan yang merajalela serta banyaknya perampokan yang terjadi dimana-mana yang mengakibatkan rakyat sangat menderita. Keadaan yang memprihatinkan inihanya bisa di atasi oleh

Raja Bicara. Akan tetapi karena berbagai kekacauan tersebut tidak mampu juga diatasi oleh Manggampo Donggo akhirnya tahta kerajaan kembali diambil alih oleh Raja Ma Wa, a Bilmana.

Pada awal abad ke XVI Kerajaan Bima mendapat pengaruh Islam dengan raja pertamanya Sultan Abdul Kahiryang penobatannya tanggal 5 Juli tahun 1640 M. Pada masa itu susunan dan penyelenggaraan pemerintahan Bima disesuaikan dengan tata pemerintahan Kerajaan Goa yang memberi pengaruh besar terhadap masuknya agama Islam di Bima. Gelar Ncuhi diganti menjadi Galarang (kepala desa). Struktur pemerintahan diganti berdasarkan majelis Hadat yang terdiri atas unsur Hadat yaitu unsur Sara dan majelis hukum yang mengemban tugas pelaksanaan hukum Islam, di dalam penyelenggaraan pemerintahan ini Sultan dibantu oleh; (1) Majelis Tureli (dewan menteri) yang terdiri dari Tureli Bolo, Woha, Belo, Sakuru, Parado dan Tureli Donggo yang dipimpin oleh Tureli Nggampo (raja bicara), (2) Majelis Hadat yang dikepalai oleh kepala hadat yang bergelar Bumi Lumah Rasa Nae dibantu oleh Bumi Lumah Bolo. Majelis Hadat ini beranggotakan dua belas orang dan merupakan wakil rakyat yang menggantikan hak Ncuhi untuk mengangkat/melantik atau memberhentikan Sultan, (3) Majelis Agama dikepalai oleh seorang Qadhi (imam kerajaan) yang beranggotakan empat orang Khotib Pusat yang dibantu oleh tujuh belas orang Lebe.

Selain menjadi daerah yang Islami, Kerajaan Bima pernah menjadi kerajaan yang makmur dan terpadang dengan memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan beberapa daerah yang terletak di sekitar Bima seperti Sumbawa, Manggarai, Sabu, Ende, Larantuka dan Komodo hingga kepulauan Alor.

Kerajaan Bima pernah dimekarkan wilayahnya menjadi Bima dan Dompu. Namun pada tanggal 12 september 1947 kerajaan Dompu dipulihkan Bima melepaskan Dompu, yang meliputi sepuluh kejenelian. Berdasarkan undang-undang Negara Indonesia Timur (NIT) No 44 1950, kerajaan Bima berubah status menjadi daerah Swapraja Bima, berikut Dewan Perwakilan Rakyat daerah Swapraja Bima pada tanggal 2 oktober 1950. Sejak saat itulah

berakhirnya perjalanan sejarah Kerajaan Bima selama 350 tahun.

Bima atau mbojo pula termasuk daerah Tingkat II Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebelum bergabung dengan NKRI, Bima telah melewati perjalanan sejarah panjang yang bermula dari masa sebelum Islam. Sayangnya, karena keterbatasan sumber mengakibatkan sulit mengungkapkan serta memaparkan sejarahnya. Dalam konteks sejarah nasional, peran dinamika politik Bima jarang diungkap, Hal ini mungkin disebabkan oleh porsi partisipasi pergolakan kekuasaan di sana yang lebih bersifat lokal dan hanya meliputi wilayah regional. Selain itu, penulisan sejarah tentang Bima lebih banyak dilatarbelakangi oleh nasionalisme berlebihan sehingga tulisan-tulisan sejarah lokal tentang peran Bima dalam dinamika politik nasional terkesan dipaksakan (Abdulah Tajib, 1945:389)

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik membuat tulisan dengan landasan historis lokal sekaligus memaparkan karakteristik masyarakat Bima. Dengan ini, selain bisa mengetahui dinamika kekuasaan di Bima, pembaca juga bisa menilai bagaimana kondisi masyarakat Bima abad ke-17-18 M.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini Penelitian ini merupakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi, karena akan mengkaji tentang peralihan sistem pemerintahan kesultanan menjadi sistem Swapraja kabupaten Bima pada Tahun 1945-1957. Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi yaitu sejarawan tokoh masyarakat.

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling, merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pada ciri, sifat atau karakteristik tertentu yang memaparkan ciri-ciri populasi dan subjek yang diambil sebagai subjek penelitian.

Dalam hal ini sesuai dengan penelitian, ciri yang dimaksud adalah orang-orang yang mengetahui tentang masa peralihan pemerintahan kesultanan Bima di lokasi penelitian. Selain itu juga, pemilihan subyek peneliti dilakukan secara tersebar dan tidak

terfokus kepada satu tempat saja. Sedangkan pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan cara memilih siapa yang pantas untuk di wawancarai yakni orang yang tahu persis mengenai peralihan sistem pemerintahan kesultanan menjadi sistem Swapraja kabupaten Bima pada Tahun 1945-1957.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses peralihan Sitem Pemerintahan Kesultanan Bima Menjadi Sistem Swapraja Kabupaten Bima pada tahun 1945-1957

Ketika Jepang masuk ke Bima sistim yang dirubah oleh Belanda kemudian diadakan kembali jadi pemerintahan di pegang oleh Sultan dan di bantu oleh Majelis Tureli. Dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari Sultan harus tunduk kepada Jepang system ini berlaku sampai Zaman kemerdekaan.

Sekalipun daerah Bima berstatus jajahan Belanda dan Jepang, Suasana politik selalu kacau dan tidak menentu, namun Sultan Muhammad Salahuddin tetap memperhatikan perkembangan dibidang agama secara diam-diam Sultan membentuk suatu badan otonomi dari Hadat kerajaan Bima yang berfungsi mengurus dan mengawasi segala aktifitas dalam bidang keagamaan. Lembaga ini diberi nama Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima.

Kedudukan Jepang pada saat perang dunia II semakin pudar dan hilang. Pada tahun 1945 kedudukan Jepang semakin sulit, disemua front tentara sekutu berhasil melumpuhkan kekuatan dan keserakahan Jepang di Indonesia pada umumnya di kesultanan Bima pada khususnya. Seminggu kemudian yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945 M, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan.

Soekarno- Hatta atas nama bangsa Indonesai pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikan bangsa Indonesia sudah merdeka. Gema proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, baru terdengar di kesultanan Bima pada tanggal 2 September 1945 yang dikirim oleh gubernur Sunda Kecil, I. Gusti Ketut Puja mengirim utusan untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan pada Sultan Muhammd Salahuddin. Utusan yang

menyampaikan berita proklamasi itu pada umumnya putera Bima yang ada di Singaraja, yaitu: Muhtar Zakaria, Majid Datuk, Mochtar Sulaiman, Saleh Sulaiman, A. Rahim Ali dan Nur Husen. Berita gembira tersebut diterima dengan senang hati oleh Sultan dan para tokoh partai politik, sosial dan keagamaan yang ada di Bima sekaligus mendukung sepenuhnya isi Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 31 Oktober 1945 dilakukan pengibaran Sang Bendera Merah Putih dihalaman Istana Kesultanan Bima. Bendera yang dikibarkan itu merupakan bendera yang berasal dari Bung Karno yang mengunjungi kota Singaraja Bali dalam rangka mengobarkan semangat juang rakyat Indonesia. Yang menerima Bendera Merah Putih dari Bung Krno adalah utusan resmi Kesultanan Bima, yaitu: Jeneli Rasa Na-e Idris Djafar bersama Jeneli Dompu Aming Daeng Emo. Selain mengibarkan Sang Merah Putih, Sultan secara resmi menyampaikan sikap seluruh rakyat dalam menyongsong peristiwa yang bersejarah yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dapat diketahui sebagaimana isi maklumat yang dikeluarkan oleh Sultan Muhammad Salahuddin pada tanggal 22 November 1945 yang berbunyi sebagai berikui: Kami Sultan Kerajaan Bima, menyatakan dengan sepenuhnya bahwa:

- a) Pemerintah Kerjaan Bima, suatu daerah Istimewah dari Negara Republik Indonesia yang berdiri di belakang pemerintah Republik Indonesia.
- b) Kami menyatakan, bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam daerah pemerintahan Kerajaan Bima terletak di tangan kami, oleh karena itu berhubungan dengan suasana pada dewasa ini, kekuasaan-kekuasaan sampai ini tidak di tangan kami, maka dengan sendirinya kembali ketangan kami.
- c) Kami menyatakan dengan sepenuhnya, bahwa berhubunga pemerintah lingkungan kerajaan Bima bersifat langsung dengan pusat Negara Republik Indonesia.
- d) Kami memerintahkan dan percaya kepada sekalian penduduk dalam seluruh Kerajaan Bima, mereka akan bersifat sesuai dengan sabda kami yang terera di atas.

Dari isi maklumat yang dikeluarkan oleh Sultan dapat dilihat betapa besar kecintaan Sultan terhadap Negara Republik Indonesiayang baru

saja lahir. Sultan menyatakan bahwa, Kesultanan Bima adalah merupakan daerah Istimewa yang berdaulat dan merdeka, yang merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia. Segala urusan pemerintah berada di tangan Sultan, dengan tetap memperhatikan ketentuan dari pemerintah pusat di Jakarta.

Perubahan kebijakan di daerah penduduk sesudah perjanjian Renville berjalan terus seirama dengan kemajuan yang dicapai dengan kemajuan yang dicapai dibidang politik dan militer antara belanda dan republik Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia timur meninjau kembali peraturan pemerintah 1946. Pada tanggal 1946 tentang pembentukan soembawa Eiland federasi dan ditetapkan kembali pada tanggal 23 agustus 1946 yang memberikan kekuasaan lebih luas kepada federasi.

Seirama dengan perubahan tersebut diatas, pemerintah kerajaan Bima melakukan penyesuaian. Pemerintahan kerajaan Bima dengan keputusan No. 50 tanggal 29 oktober 1948 mengeluarkan peraturan pembentukan dewan perwakilan rakyat daerah kerajaan daerah beranggotakan 20 orang dengan ketentuan 16 orang dipilih melalui pemilihan system kiesman dan 4 orang dari golongan minoritas melalui pengangkatan. Kondisi dan situasi politik yang semakin terbuka dengan lahirnya perjanjian Rum-Royen tanggal 14 april 1949 yang menghantarkan pemerintah belanda dan pemerintah Republik Indonesia serta delegasi pertemuan untuk permusawaratan federasi ke meja perundingan meja bundar. konferensi meja bundar berhasil menyelesaikan pertikaian Indonesia belanda berdasarkan Undang-Undang NIT No. 44/1950 Kerajaan bima berubah status menjadi daerah swapraja bima lengkap dengan dewan perwakilan rakyat daerah swapraja Bima pada tanggal 2 oktober 1950.

Peralihan yang benar-benar besar besar pada saat itu adalah setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pihak pemuda berusaha merebut senjata dari Jepang. Akan tetapi rencana tersebut kedahuluhan bocor, maka hasilnya pun sedikit. Berita Proklamasi 17 Agustus yang walaupun terlambat datangnya disambut dengan hebat dan menjadi pendorong perjuangan. Pada tanggal 17

September 1945, komite Nasional Indonesia Cabang Bima terbentuk dengan ketua dan penulisan masing-masing. Abdullah dan Amin Saleh, dan wakil ketua ialah M. Tayeb pada tanggal 31 Oktober 1945 Sang Merah Putih berkibar untuk pertama kali di gedung KNI Raba, Dompu dan Sumbawa Besar. Persengketaan antara Jepang dengan pemuda-pemuda semakin menjadi. Untuk mencegah pendaratan sekutu, pantai-pantai dijaga para pemuda. Dari pusat pun datang lima orang pemuda antara lain : Husni Abbas dan Ishak Saleh.

Atas desakan kesultanan susunan pengurus KNI diubah. Dalam perubahan itu ketua dan wakil ketua KNI masing-masing: AD Talu dan Hasan. Pada tanggal 11 Januari 1946 kapal perang sekutu masuk di pelabuhan Bima. Perundingan antar Belanda dan Pemerintah Indonesia terjadi. Perundingan berlangsung dengan tekanan-tekanan dari pihak Sekutu. Pada 12 Januari 1946 tentara NICE mendarat dipulau Sumbawa. Penangkapan atas pimpinan pemuda segera terjadi. Yang tidak tertangkap melarikan diri tetapi akhirnya tertangkap juga.

Pada saat itu dan proses Swapraja ini berlangsung dalam dinamika politik yang terjadi antara mempertahankan Kesultanan Bima sebagai daerah istimewa dan Kesultanan Bima harus bubar dan mengikuti arah angin. Proklamasi yang menginginkan adanya sebuah daerah baru yaitu Daerah Swapraja yang dibentuk Pemerintah Negara Republik Indonesia, tapi fluktuasi yang terjadi juga ada keinginan untuk bergabung dengan Negara Indonesia timur yang dibentuk oleh panmok, itu memang terjadi pada saat itu pada tahun 1950 Bima keluar pada NICE itu sendiri dan Swapraja semakin kuat dengan pemerintah Swapraja itu dipimpin oleh beberapa Putra Bima antara lain yaitu: 1. Muhammad Hasan, 2. M. Indris Djafar, 3. Abidin Ishak dan ada juga putra abdul kahir sendiri yang memimpin kepemimpinan Swapraja, kemudian menjadi daerah datil dua Kabupaten Bima.

Pada saat ini karena perkembangan nasional terus berkembang ketiga kesultanan dipulau Sumbawa mengadakan suatu ikatan yang dinamai "federasi pulau Sumbawa" (1946). Di tiap-tiap swapraja didirikan Dewan yang anggota-anggotanya diangkat dan ditunjuk oleh kepala

Swapraja. Tugas dewan ialah memberi nasehat kepada kepala daerah swapraja. Pertengahan tahun 1947 di Daerah pulau Sumbawa didirikan pula sebuah dewan yang dinamakan Dewan pulau Sumbawa. Anggota-anggota dewan tersebut diambil dari rakyat kerajaan masing-masing menurut banyaknya penduduk. Dewan ini bertugas memberikan nasehat kepada dewan raja-raja. Pada tahun 1947 semua hak kekuasaan HPF (Hoofd van Plaatselijk Bestuur) Di ketiga swapraja diatas diserahkan kedalam tangan Zelfbestuurder . Pada tanggal 1 januari 1949 dewan kerajaan dan dewan-dewan pulau Sumbawa anggota-anggotanya diganti dengan anggota-anggota pilihan rakyat yang pemilihannya secara bertingkat.

Pemilihan ini berjalan dengan lancar. Pada tanggal 26 maret 1946 kekuasaan asisten resident diserahkan kepada ketua Dewan raja-raja, yaitu Sri Sultan Bima Muhammad Salahuddin. Timbulnya pemberontakan Andi azis pada bulan april 1950 menghilangkan kepercayaan rakyat Sumbawa pada pemerintahan NIT pada tanggal 9 mei 1950 dewan raja-raja bersama-sama DPR. Pulau Sumbawa yang didukung oleh Ormas/Orpol mengeluarkan statement yang isinya keluar dari NIT dan menggabungkan diri dengan RI Yogya.

2. Dampak peralihan sistem pemerintahan kesultanan bima menjadi sistem swapraja kabupaten Bima pada tahun 1945-1957

Adapun dampak dampak yang dirasakan pada saat itu Dalam kesultanan Bima menyelenggarakan tiga system dari lembaga itu kalau di istilahkan seperti: humentisku, dinas politika dan itu terjadi sejak tahun 1700-1800 memang mengandung sistem pemerintahan yang dibangun oleh tiga pilar tadi. dampak itu sehingga pada akhirnya kesultanan Bima bubar tata Hukum dan

Tata pemerintahan hilang semuanya dan yang diadopsi kemudian adalah tata hukum tata pemerintahan republik Indonesia hukum-hukum yang berlaku adalah hukum positif peninggalan belanda, jadi Hukum adat hilang Hukum positif itulah yang menjadi hukum bagi Pemerintah Swapraja Bima pada saat itu. Yang kemudian berlanjut menjadi Kaerah kabupaten Dati dua.

Jadi setelah itu dari proses integrasi itu sendiri memang terjadi pada tahun 1945 sampai pada masa transisi lahirnya UUD No 64 Tahun 1958 banyak sekali fluktuasi dan dinamika politik yang terjadi yang mengiringi perjalanan Peralihan dari Kesultanan kepada Swapraja dan Swapraja menjadi daerah Swatantra dulu, tapi kemudian menjadi Daerah Kabupaten dati dua yang terjadi pada waktu itu sehingga pada tahun 1958 Bima resmi bergabung dengan NKRI dan menjadi daerah Kabupaten dati dua itulah Dampak-Dampak yang terjadi setelah Proses integrasi ke NKRI.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Proses perubahan sistem pemerintahan kerajaan Bima diawali dengan politik-politik yang terjadi pada masa sekitar tahun 1945 setelah Indonesia di proklamasikan oleh Drs. Mohammad Hatta dan Soekarno pada tanggal 17 agustus 1945 namun informasi tentang kemerdekaan itu baru tiba di Bima sekitar bulan Oktober oleh pelajar Bima yang menempuh pendidikan di singgaraja Bali sehingga pengibaran Bendera Sang Merah Putih pertama di Bima dilakukan pada tanggal 31 Oktober 1945 dan di proklamasikan kemerdekaan oleh Dr. Soekarno sehingga terjadinya perubahan-perubahan politik.

Peralihan Sistem Pemerintahan Kesultanan Bima Menjadi Sistem Swapraja Kabupaten Bima pada Tahun 1945-1957. Membawa dampak bagi kesultanan Bima. Namun memberikan pula dampak positif yang dimana Kesultanan Bima mampu menanggulangi penjajahan jepang dan NICA dengan lancar dengan bantuan KNID. KNID merupakan salah satu dewan yang menasihati sekaligus meringankan pekerjaan Kesultanan Bima pada saat itu.

Berdasarkan simpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran: (1) Sebaiknya pemerintah daerah dalam hal ini mengajukan kepada sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai SMP yang berada di kabupaten Bima untuk mengajak sejarah Bima kepada siswa. Dengan demikian para siswa sebagai generasi muda akan mengetahui dan mencintai sosial budayanya. Sehingga mereka tidak terbius oleh sosial budaya asing yang bertentangan dengan pandangan hidup bangsa yaitu pancasila. (2)

Untuk melestarikan hasil budaya Bima pada masa lalu terutama pada masa Kesultanan, sebaiknya pemerintah daerah meningkatkan pemeliharaan dan pengamanan benda-benda budaya dan bangunan bersejarah lainnya. Karena benda-benda tersebut akan mampu mengisahkan riwayat kebesaran zaman nya kepada generasi masa kini dan masa yang akan datang.

REFERENSI

- [1] Abdulah Tajib. (1995). *Sejarah Bima Dan Mbojo*. Jakarta: PT harapan masa PGRI.
- [2] Agung Perdana. (2004). *Perang Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Nusantara*. Mataram: Lengge.
- [3] Utrech, E.S.H. (1965). *Sejarah Hukum Adat Internasional*. Bandung: Sumur.
- [4] Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Yayasan Banteng Budaya.
- [5] Mahsun. (2005). *Meode Penelitian*. Jakarata: Jakarta Press.
- [6] Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- [7] Ismail, M.Hilir. (2008). *Kebangkitan di Dana Mbojo (Bima)*. Bogor: Binasti.
- [8] Salahuddin, Siti Maryam R. (2012). *Bo'sangaji kai; Catatan Kerajaan Bima*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [9] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- [10] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.